

ISSN : 1412-5331

MAJALAH ILMIAH  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEMARANG

# S O L U S I

Vol. 8 No. 4 Oktober 2009

Internal Audit, Kapan Eksternal Audit juga  
Melaksanakan Internal Audit  
*Febrina Nafasati*

*Earnings Management* : Teori dan Penerapan  
*Dian Indriana T*

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dividen Kas pada  
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
*Martyanto Wahyu Daryoko, Ardiani Ika S*

Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan  
*Mobile Banking* pada Perusahaan Perbankan di Indonesia  
*Umi Pratiwi, Muhammad Nur*

Teknik dan Teori-teori Pengambilan Keputusan  
*Nunik Kusnilawati*

*Forensic Audit dan Fraud Audit*  
*Febrina Nafasati*

Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)  
dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas  
(Studi Kasus di Kecamatan Kedung Banteng)  
*Dijan Rahajuni, Endang Sri Gunawati, Suprpto*

Aspek Sumber Daya Manusia dalam Berwirausaha  
*Andy Kridasusila*

Analisis Sistem Informasi untuk Mendukung Aktivitas Bisnis  
*Dian Triyani*

Strategi Perusahaan Multinasional Mengantisipasi  
Resiko Bisnis Global  
*Ardiani Ika S*

ISSN : 1412-5331

MAJALAH ILMIAH  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEMARANG

# S O L U S I

Vol. 8 No. 4 Oktober 2009

Internal Audit, Kapan Eksternal Audit juga  
Melaksanakan Internal Audit  
*Febrina Nafasati*

*Earnings Management* : Teori dan Penerapan  
*Dian Indriana T*

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dividen Kas pada  
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
*Martyanto Wahyu Daryoko, Ardiani Ika S*

Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan  
*Mobile Banking* pada Perusahaan Perbankan di Indonesia  
*Umi Pratiwi, Muhammad Nur*

Teknik dan Teori-teori Pengambilan Keputusan  
*Nunik Kusnilawati*

*Forensic Audit* dan *Fraud Audit*  
*Febrina Nafasati*

Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)  
dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas  
(Studi Kasus di Kecamatan Kedung Banteng)  
*Dijan Rahajuni, Endang Sri Gunawati, Suprpto*

Aspek Sumber Daya Manusia dalam Berwirausaha  
*Andy Kridasusila*

Analisis Sistem Informasi untuk Mendukung Aktivitas Bisnis  
*Dian Triyani*

Strategi Perusahaan Multinasional Mengantisipasi  
Resiko Bisnis Global  
*Ardiani Ika S*

## SOLUSI

Mengkaji masalah-masalah sosial, ekonomi dan bisnis  
Terbitan 3 bulan sekali  
(Januari, April, Juli, Oktober)

Penerbit :  
Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

Pelindung :  
Rektor Universitas Semarang

Penanggungjawab :  
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

Dewan redaksi :  
Prof. Dr. Pahlawansjah Harahap, SE, ME (USM)  
Prof. Dr. Imam Ghozali M.Com, Hons.Akt (UNDIP)  
Prof. Supramono SE, MBA, DBA(UKSW)  
Prof. Dr. Dra. Sulastri ME. M.kom (UNISRI)  
Dr. Ir. Kesi Widjajanti SE MM (USM)

Redaktur Pelaksana :  
Andy Kridasusila SE MM  
Ardiani Ika S., SE MM Akt  
Adijati Utaminingsih SE MM

Sekretaris Redaksi :  
Amerti Irvin Widowati SE MSi Akt

Tata Usaha :  
Ali Arifin

Alamat Penerbit/Redaksi :  
Jl. Soekarno Hatta (Tlogosari)  
Telp. (024) 6702757, Fax. (024) 6702272  
SEMARANG – 50196

Terbit Pertama kali : Juli 2002

## KATA PENGANTAR

Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami, tatkala kami dapat hadir rutin setiap 3 bulan sekali untuk saling bertukar pikiran mengenai hal-hal baru di bidang ilmu ekonomi baik manajemen, akuntansi maupun studi pembangunan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca, pengirim artikel yang antusias untuk melakukan tukar pikiran dan berkomunikasi melalui media ini. Sekiranya hal ini dapat dipertahankan, maka selain kehadiran kami akan selalu dapat terlaksana dengan tepat waktu dan artikel yang beragam, wawasan pembaca juga akan semakin luas.

Penerbitan majalah ilmiah SOLUSI kali ini menghadirkan 10 (sepuluh) artikel yang telah kami anggap layak untuk diterbitkan, dengan harapan artikel-artikel ini dapat menjadi tambahan referensi bagi para pembaca dan menjadi sumbangan kami terhadap dunia ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu ekonomi bagi pengembangan organisasi swasta maupun institusi pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Hormat kami,

Redaksi

## SOLUSI

Vol. 8 No. 4 Oktober 2009

ISSN : 1412-5331

### DAFTAR ISI

1. Internal Audit, Kapan Eksternal Audit juga Melaksanakan Internal Audit ..... <i>Febrina Nafasati</i>	1 - 8
2. <i>Earnings Management</i> : Teori dan Penerapan ..... <i>Dian Indriana T</i>	9 - 20
3. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dividen Kas pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia ..... <i>Martyanto Wahyu Daryoko, Ardiani Ika S</i>	21 - 35
4. Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan <i>Mobile Banking</i> pada Perusahaan Perbankan di Indonesia ..... <i>Umi Pratiwi, Muhammad Nur</i>	37 - 48
5. Teknik dan Teori-teori Pengambilan Keputusan ..... <i>Nunik Kusnilawati</i>	49 - 55
6. <i>Forensic Audit dan Fraud Audit</i> ..... <i>Febrina Nafasati</i>	57 - 64
7. Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Kecamatan Kedung Banteng) ..... <i>Dijan Rahajuni, Endang Sri Gunawati, Suprpto</i>	65 - 73
8. Aspek Sumber Daya Manusia dalam Berwirausaha ..... <i>Andy Kridasusila</i>	75 - 79
9. Analisis Sistem Informasi untuk Mendukung Aktivitas Bisnis ..... <i>Dian Triyani</i>	81 - 86
10. Strategi Perusahaan Multinasional Mengantisipasi Resiko Bisnis Global ..... <i>Ardiani Ika S</i>	87 - 92

# Strategi Perusahaan Multinasional Mengantisipasi Resiko Bisnis Global

Oleh :  
Ardiani Ika S  
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

## Pendahuluan

Perusahaan multinasional dipengaruhi oleh situasi politik di negara tuan rumah dan perubahan hubungan politik antara negara tuan rumah, negara asal dan negara pihak ketiga. Keadaan dan kejadian politik yang mempengaruhi perusahaan multinasional dinamakan resiko politik. Pengaruh tersebut dapat berdampak positif atau negatif kepada perusahaan multinasional. Namun dalam kenyataannya, perhatian manajer biasanya terfokus pada pengaruh negatif yang mungkin terjadi.

Manajemen resiko politik mengacu pada langkah yang diambil oleh perusahaan untuk menaksir kemungkinan kejadian politik yang tidak terduga, untuk mengantisipasi bagaimana kejadian tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan perusahaan dan untuk menghindari kerugian (atau mencoba mendapatkan keuntungan) dari kejadian tersebut.

## Dekomposisi Resiko Politik

Secara historis, resiko politik yang dihadapi perusahaan multinasional timbul karena adanya isu-isu seperti pengaruh perusahaan multinasional terhadap pembangunan ekonomi, anggapan bahwa perusahaan multinasional akan melanggar kedaulatan nasional, pengendalian perusahaan asing atas industri penting, pengaruh terhadap neraca pembayaran negara tuan rumah, pengendalian atas pasar ekspor oleh perusahaan multinasional, dan eksploitasi sumber daya alam.

Resiko politik yang timbul dapat dilihat melalui konflik tujuan, yaitu antara perusahaan multinasional dengan kebijakan pemerintah negara tuan rumah, baik kebijakan ekonomi maupun kebijakan non-ekonomi. Prioritas ekonomi nasional di setiap negara adalah tingkat pertumbuhan *gross domestic product* perkapita yang terus menerus, tingkat kesempatan kerja penuh, stabilitas harga, keseimbangan transaksi luar negeri dan distribusi pendapatan yang merata. Konflik antara perusahaan multinasional dan kebijakan ekonomi pemerintah dapat terjadi di bidang :

### 1. Kebijakan moneter

Setiap pemerintah berusaha untuk mengendalikan biaya penyediaan kredit domestik dan modal jangka panjang dengan tujuan mencapai prioritas ekonomi nasional. Pengaturan ini menyebabkan perusahaan multinasional menghadapi kendala kredit karena mahalnya biaya kredit di negara tuan rumah. Akibatnya, perusahaan multinasional berusaha mendapatkan dana tambahan dari perusahaan induk di negara asal. Aktivitas ini menyebabkan terjadinya aliran modal masuk (*capital inflow*) atau disebut juga *hot money flow* yang menyebabkan kenaikan penawaran uang dalam negeri. Akibatnya pemerintah perlu mengantisipasi hal ini, antara lain dengan melakukan operasi pasar terbuka dan kebijakan lainnya.

### 2. Kebijakan fiskal

Operasi perusahaan multinasional akan mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Pada sisi pendapatan, kelonggaran pajak yang digunakan untuk memikat perusahaan multinasional menyebabkan pendapatan pemerintah tuan rumah menurun. Pada sisi pengeluaran, investasi baru yang dilakukan oleh perusahaan multinasional menciptakan kebutuhan akan jalan baru atau jalan tol, perumahan, sekolah dan fasilitas kesehatan.

### 3. Kebijakan kurs dan neraca pembayaran

Masalah neraca pembayaran atau masalah kurs, oleh pemerintah biasanya sering diberlakukan peraturan yang menghambat operasi perusahaan, seperti pemberian lisensi impor, kategori barang dan jasa yang boleh diimpor dan diekspor, batas maksimum impor dan pendanaan ulang utang luar negeri yang hampir jatuh tempo (*outstanding debt*).

### 4. Proteksionisme ekonomi

Pembatasan atau hambatan dalam kebijakan ekonomi nasional sering dimotivasi oleh proteksionisme, kadang dengan alasan kebijakan neraca pembayaran dan kadang dengan alasan

pembangunan ekonomi. Sehingga perusahaan multinasional dibatasi atau tidak diijinkan berdiri di negara bersangkutan.

#### 5. Kebijakan pembangunan ekonomi

Proteksi terhadap infant industry seringkali dilanjutkan sebagai argumen untuk pengenaan tarif yang tinggi atau pembatasan inventasi luar negeri. Bahkan ada yang diproteksi terus walaupun perusahaan tersebut telah berjalan lama. Di India, Brasil, Meksiko dan Argentina, perusahaan multinasional yang menghasilkan otomobil diharuskan meningkatkan proporsi komponen lokal, dengan diberlakukannya kebijakan komponen lokal minimum. Kebijakan ini menyebabkan kesulitan bagi perusahaan multinasional untuk menyesuaikan proses produksinya dengan kebijakan tersebut.

Konflik dengan kebijakan non-ekonomi pemerintah negara tuan rumah yang paling sering muncul untuk menentang perusahaan multinasional adalah :

#### 1. Imperialisme ekonomi

Di banyak negara bekas jajahan timbul kecurigaan bahwa perusahaan multinasional mewakili bentuk baru imperialisme, yang lebih bersifat ekonomi daripada politik atau militer. Negara-negara ini seringkali tidak dapat membedakan antara perusahaan asing pribadi yang bermotif mencari keuntungan dan perusahaan pemerintah negara asal.

#### 2. Keamanan nasional dan kebijakan luar negeri

Negara tuan rumah kadang khawatir bahwa pengendalian perusahaan asing atas sektor industri penting akan mengganggu keamanan nasional atau kebijakan luar negeri. Sebagai contoh, Kanada menyaring dan membatasi investasi luar negeri baru karena lebih dari separuh industri manufaktur dan pertambangan Kanada dimiliki oleh Amerika Serikat, termasuk sektor yang paling penting dan berhubungan dengan keamanan nasional.

#### 3. Transisi sosial

Konflik terbesar antara investor dan pemerintah tuan rumah terjadi selama periode transisi sosial negara tuan rumah. Rusia setelah Perang Dunia I, negara-negara Eropa Timur dan Cina setelah Perang Dunia II, Kuba tahun 1959, Libya tahun 1969, Cile tahun 1977 dan Iran tahun 1979 adalah sebagian contoh negara-negara yang mengalami transisi sosial. Pada saat tersebut, perusahaan swasta, termasuk semua perusahaan besar yang dimiliki oleh asing, diambil alih oleh pemerintah setempat.

#### 4. Warisan budaya dan agama

Dalam banyak kasus, warisan budaya dan agama Kristen-Yahudi pada banyak perusahaan multinasional bertentangan dengan tradisi negara tuan rumah. Di Timur Tengah misalnya, teknisi dan eksekutif di perusahaan minyak multinasional membawa serta pandangan mereka tentang peran serta wanita dalam bisnis dan tentang konsumsi alkohol yang berbeda dengan agama Islam. Paham Barat menerima wanita sebagai eksekutif, dan dalam perjanjian kerjanya menunjukkan secara jelas posisi yang ditempatinya, termasuk tanggung jawab negosiasi dan pengambilan keputusan di perusahaan multinasional yang bertempat di Timur Tengah, Asia dan Afrika. Semua ini sering bertentangan dengan adat istiadat setempat.

### **Regulasi Pemerintah Tuan Rumah yang Menghambat Operasi Perusahaan Multinasional**

Dalam mencapai tujuan nasional, pemerintah tuan rumah sering mengadopsi hukum dan administrasi yang membatasi jalannya perusahaan multinasional. Regulasi yang dapat menghambat diklasifikasikan menjadi regulasi yang non-diskriminatif, regulasi yang diskriminatif dan pencabutan kekayaan (*wealth depriving*).

#### 1. Regulasi yang Non-Diskriminatif

Regulasi yang non-diskriminatif umumnya ringan dan tidak langsung melawan pelaksanaan perusahaan multinasional. Beberapa contoh regulasi non-diskriminatif, antara lain :

- Mengharuskan adanya warga setempat yang menduduki posisi manajer puncak atau duduk dalam dewan direksi
- Menetapkan aturan atas penetapan harga transfer yang menguntungkan bagi perhitungan pajak
- Mengharuskan industri ekspor tertentu untuk menjual produknya di dalam negeri, untuk memenuhi konsumsi masyarakat di negara tuan rumah (sebagai contoh perusahaan farmasi)

- Mengharuskan pembangunan fasilitas sosial, seperti sekolah, tempat tinggal pekerja, fasilitas kesehatan, tempat ibadah dan jalan oleh perusahaan yang melakukan investasi
  - Mengharuskan penggunaan komponen lokal dengan prosentase tertentu dalam menghasilkan output.
2. **Regulasi yang Diskriminatif**  
Regulasi yang diskriminatif memberikan keuntungan khusus bagi perusahaan lokal atau nasional dan merugikan perusahaan multinasional. Regulasi ini bertujuan melindungi perusahaan dalam negeri yang lemah dari persaingan perusahaan asing. Beberapa contoh regulasi yang diskriminatif, antara lain :
- Menasionalisasi industri yang didominasi oleh perusahaan asing. Misalnya di Brasil tahun 1988, Kongres Brasil menyetujui peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa eksploitasi dan pertambangan cadangan dan sumber daya mineral hanya boleh dilakukan oleh perusahaan nasional atau perusahaan yang dimiliki penduduk Brasil.
  - Hanya mengizinkan usaha patungan (*joint venture*) dengan batas kepemilikan perusahaan asing kurang dari 50 %
  - Ketentuan pajak khusus atau biaya operasi perusahaan asing. Misalnya pengenaan biaya visa yang tinggi terhadap manajer asing atau pajak penghasilan yang tinggi atas pekerja asing
  - Ketentuan bagi perusahaan asing agar mengambil tenaga kerja melalui departemen pemerintah dengan tingkat gaji yang lebih tinggi daripada perusahaan domestik
  - Mendorong boikot nasional terhadap barang produksi perusahaan asing, atau mendorong pemogokan pekerja pada perusahaan asing tersebut
3. **Pencabutan kekayaan (*Wealth Depriving*)**  
Pencabutan kekayaan meliputi regulasi pemerintah yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi perusahaan multinasional. Kerugian tersebut bisa bersifat parsial, seperti menyebabkan melemahnya perusahaan multinasional, atau bersifat total, seperti pengambilalihan perusahaan multinasional oleh pemerintah tuan rumah atau nasionalisasi industri tertentu. Kasus-kasus pencabutan kekayaan meliputi :
- Menjalankan pengendalian secara paksa
  - Pembatasan distribusi produk
  - Menetapkan pembatasan pembagian dividen dan memerintahkan penginvestasian kembali (*reinvestment*)

### **Mengukur Resiko Politik**

Perusahaan multinasional dapat mengantisipasi regulasi pemerintah tuan rumah melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan level makro dan pendekatan level mikro. Pada level makro, perusahaan mencoba menilai stabilitas politik negara tuan rumah dan perilakunya terhadap investor asing. Pada level mikro, perusahaan menganalisis apakah aktivitas nasional tuan rumah sangat sulit diantisipasi, karena kadang kala dapat berubah secara cepat. Perubahan prioritas tujuan nasional menyebabkan perubahan regulasi, yang akan memberikan pengaruh yang berbeda bagi jalannya perusahaan.

### **Meramal Stabilitas Politik**

Studi tentang resiko politik biasanya meliputi analisis stabilitas historis negara bersangkutan, fakta-fakta kekacauan dan ketidakpuasan yang terjadi, indikasi stabilitas ekonomi dan kecenderungan dalam aktivitas agama dan kebudayaan. Data yang digunakan diolah dari surat kabar setempat, siaran televisi dan radio, bacaan yang dipublikasikan oleh diplomat negara bersangkutan, pengetahuan dari konsultan ahli, menghubungi orang-orang yang memiliki pengalaman bisnis di negara bersangkutan, atau dapat langsung mengunjungi negara bersangkutan.

### **Meramal Resiko Spesifik Perusahaan**

Perusahaan multinasional dengan bisnis berbeda yang beroperasi di negara tuan rumah yang sama, memiliki tingkat perbedaan dalam menerima perubahan kebijakan atau regulasi pemerintah negara tuan rumah. Misalnya Kentucky Fried Chicken tidak akan menghadapi resiko politik yang sama dengan Ford dalam negara tuan rumah yang sama.

Kebutuhan untuk menganalisis resiko spesifik perusahaan menyebabkan timbulnya permintaan terhadap studi yang dihasilkan oleh analisis resiko politik profesional dari negara tuan



rumah. Namun, walaupun perusahaan telah menggunakan analisis spesifik tentang resiko yang akan dihadapinya, perusahaan multinasional tidak dapat yakin sepenuhnya bahwa situasi politik dan ekonomi di negara tuan rumah tidak akan berubah. Karena itu perlu untuk merencanakan langkah protektif agar kerugian yang diderita dapat ditekan serendah mungkin. Langkah protektif yang mungkin dilakukan dapat dibagi tiga kelompok, yaitu :

1. Melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan pemerintah tuan rumah sebelum melakukan investasi  
Pendekatan manajemen resiko politik yang terbaik saat ini adalah mengantisipasi masalah dan merundingkan beberapa pengertian penting tentang investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan multinasional sebelum pelaksanaan investasi. Hal ini karena masing-masing negara berbeda dalam menghargai kontrak yang dilakukan sebelum investasi terjadi. Kebudayaan yang berbeda menghasilkan etika yang berbeda, khususnya jika mereka mendiskusikan tentang administrasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan multinasional. Karena itu, negosiasi harus menjelaskan dengan rinci keuntungan ekonomi yang akan diterima oleh kedua belah pihak jika investasi dilakukan.

Perundingan perjanjian investasi dapat dilakukan dengan menyatakan hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik perusahaan maupun pemerintah tuan rumah. Perjanjian investasi harus memuat kebijakan di bidang keuangan dan isu-isu manajerial antara lain :

- Atas dasar apa aliran dana dilakukan, apakah berdasarkan deviden, biaya manajemen, royalti, paten atau pembayaran kembali pinjaman
- Dasar penentuan harga transfer
- Hak untuk mengekspor ke negara pihak ketiga
- Kewajiban untuk membangun atau membiayai proyek pendirian fasilitas ekonomi dan sosial
- Metode pajak, meliputi tingkat pajak, tipe pajak dan cara pembayaran
- Akses ke pasar modal negara tuan rumah, khususnya untuk pinjaman jangka panjang
- Modal perusahaan multinasional 100 % dimiliki asing atau diperlukan partisipasi pemilik lokal (*joint venture*)
- Pengendalian harga atas penjualan di pasar domestik tuan rumah
- Ijin untuk menggunakan manajer dan teknisi dari luar negeri dan membayar visi ataupun pajak pendapatan tenaga kerja asing

Perusahaan multinasional dapat memindahkan resiko politik ke lembaga tertentu melalui program garansi dan asuransi investasi untuk melindungi investasi yang dilakukan perusahaan tersebut di negara lain, yang meliputi :

- Perlindungan atas kerugian karena resiko politik dan perdagangan dengan cara menyusun pembayaran ulang utang beserta bunga kepada perusahaan atau investor yang memenuhi syarat
- Dana investasi yang ditawarkan dalam mata uang negara asal
- Bantuan keuangan untuk pembangunan proyek baru yang layak di negara lain.

Asuransi untuk resiko politik yang biasanya ditawarkan meliputi :

- *Inconvertibility*, yaitu resiko dimana investor tidak dapat mengkonversikan keuntungan, royalti, *fee* dan pendapatan lain ke mata uang negara asal
- *Expropriation*, yaitu resiko karena pemerintah negara tuan rumah mengambil langkah tertentu untuk mencegah investor asing menggunakan secara penuh properti yang tersedia dengan cara pengendalian efektif
- Asuransi terhadap perang, revolusi, pemberontakan dan keributan massa
- Asuransi pendapatan bisnis, yaitu kompensasi kerugian bisnis yang disebabkan kejadian politik

2. Menetapkan strategi operasi setelah investasi dilakukan

Perusahaan multinasional yang ingin tetap mempertahankan usahanya harus berhadapan dengan tujuan nasional negara tuan rumah. Selain itu, perusahaan multinasional juga harus meningkatkan posisinya dalam berunding. Posisi perundingan dapat ditingkatkan melalui pertimbangan yang hati-hati dalam kebijakan :

- Strategi produksi dan logistik  
Strategi produksi dan logistik dapat meningkatkan posisi perundingan perusahaan yang meliputi sumber daya lokal, lokasi fasilitas, pengendalian transportasi dan pengendalian teknologi

- Strategi pemasaran  
Strategi pemasaran untuk meningkatkan posisi berunding perusahaan meliputi pengendalian pasar, merek dan *trade mark*
  - Strategi keuangan  
Strategi keuangan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi berunding perusahaan, dapat dilakukan melalui porsi pinjaman lokal yang besar, peminjaman dari berbagai sumber, pembagian kepemilikan dan perlengkapan kontraktual
  - Strategi organisasional  
Strategi organisasional meliputi menemukan rekan *joint venture* yang tepat, memberikna lisensi kepada perusahaan lokal untuk memproduksi barang atau jasa perusahaan multinasional dan mengelola bisnis lokal ala kontrak manajemen.
3. Mempersiapkan perencanaan krisis jika situasi politik dan ekonomi di negara tuan rumah memburuk.  
Perusahaan dapat merencanakan lebih lanjut apa yang akan mereka lakukan jika lingkungan luar negeri mengalami ketidakpastian karena adanya peristiwa politik yang membuat keadaan politik di negara tuan rumah tidak menentu. Dalam perencanaan krisis, pekerja lokal diikutsertakan dalam penajakan pendapat, karena diharapkan mereka lebih mengetahui situasi politik tersebut daripada pekerja atau manajer dari negara asal. Namun demikian, situasi politik yang memburuk dengan tiba-tiba sangat sulit untuk diantisipasi. Tersedianya rencana dan pengetahuan berkaitan dengan apa yang akan terjadi bukan merupakan suatu jaminan bahwa perusahaan tersebut akan terlepas dari resiko politik.

### **Kesimpulan**

Resiko politik yang dihadapi perusahaan multinasional timbul karena adanya isu-isu seperti pengaruh perusahaan multinasional terhadap pembangunan ekonomi, anggapan bahwa perusahaan multinasional akan melanggar kedaulatan nasional, pengendalian perusahaan asing atas industri penting, pengaruh terhadap neraca pembayaran negara tuan rumah, pengendalian atas pasar ekspor oleh perusahaan multinasional, dan eksploitasi sumber daya alam.

Konflik antara perusahaan multinasional dan kebijakan ekonomi pemerintah dapat terjadi di bidang kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan kurs dan neraca pembayaran, proteksionisme ekonomi dan kebijakan pembangunan ekonomi.

Konflik dengan kebijakan non-ekonomi pemerintah negara tuan rumah yang paling sering muncul untuk menentang perusahaan multinasional adalah imperialisme ekonomi, keamanan nasional dan kebijakan luar negeri, transisi sosial, warisan budaya dan agama

Dalam mencapai tujuan nasional, pemerintah tuan rumah sering mengadopsi hukum dan administrasi yang membatasi jalannya perusahaan multinasional. Regulasi yang dapat menghambat diklasifikasikan menjadi regulasi yang non-diskriminatif, regulasi yang diskriminatif dan pencabutan kekayaan (*wealth depriving*).

Perusahaan multinasional tidak dapat yakin sepenuhnya bahwa situasi politik dan ekonomi di negara tuan rumah tidak akan berubah. Karena itu perlu untuk merencanakan langkah protektif agar kerugian yang diderita dapat ditekan serendah mungkin, yaitu melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan pemerintah tuan rumah sebelum melakukan investasi, menetapkan strategi operasi setelah investasi dilakukan dan mempersiapkan perencanaan krisis jika situasi politik dan ekonomi di negara tuan rumah memburuk.

**Daftar Pustaka :**

- Busse, Mathias, 2004 , **Trade, Environmental Regulations and the WTO**, World Bank Policy Research Working Paper No. 3361, July, [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)
- Crowley, Meredith A., 2003, **An Introduction to the WTO and GATT**, Economic Perspectives 4th Quarter 2003, Federal Reserve Bank of Chicago: Chicago
- Eiteman, D.K., 1995, **Multinational Business Finance**, Addison-Wesley Publishing Company
- Elton, E.J., dan Gruber, M.J., 1995, **Modern Portfolio Theory and Investment Analysis**, John Wiley and Sons
- Levi, M.D., 1990, **International Finance**, McGraw-Hill Publishing Company, New York
- Soesastro, Hadi & M. Chatib Basri, 2005, **The Political Economy of Trade Policy in Indonesia**, CSIS Working Paper Series No. wpe 092, March, [www.csis.or.id](http://www.csis.or.id)
- Van Horne, 1989, **Financial Management and Policy**, Prentice Hall International Inc.
- Yuliati, 1996, **Manajemen Portofolio dan Analisis Investasi**, Penerbit Andi, Yogyakarta